

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponororogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perbaikan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis yang disusun, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang menekankan kepada *good governance* telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak yang terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.



Ponorogo, 31 Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo

[Handwritten Signature]
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805121990092002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Struktur Organisasi	2
Tugas dan Fungsi	3
Isu Strategis	3
Keadaan Pegawai	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis SKPD	5
1. Visi.....	5
2. Misi	6
3. Tujuan	6
4. Sasaran	7
5. Indikator Kinerja.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	11
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025	12
2.1.Capaian Sasaran	12
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32
LAMPIRAN:	
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
b. Matriks Renstra	
c. Reviu Perjanjian Kinerja tahun yang dilaporkan	
d. Pengukuran Kinerja Tahunan tahun yang dilaporkan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Sasaran : I. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Dengan indikator :

1. Jumlah kriminalitas.

Realisasi Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo berdasarkan data dari POLRES Ponorogo Tahun 2025 adalah 270 Kasus.

2. Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.

Realisasi prosentase konflik yang dapat diredam pada Tahun 2025 adalah 100 % dari yang ditargetkan sebelumnya adalah 100 %.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029

Sasaran : I. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Dengan indikator :

1. Angka kriminalitas

Realisasi angka kriminalitas Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah 27,62.

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Tahun 2025 belum dapat dihitung karena pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026.

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada Tahun 2025 adalah 76,49.

Sasaran : II. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 belum bisa dihitung karena Nilai SAKIP belum dirilis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang.

Dalam rangka ikut berperan serta serta dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif, maka yang di pandang perlu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Sebagai upaya untuk menciptakan situasi sebagaimana yang diharapkan maka upaya yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan deteksi dini dan cegah dini melalui Sosialisasi, pembinaan, pemantauan terhadap masyarakat maupun situasi wilayah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja.

Selain itu juga berfungsi sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ;
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- 1.1 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan;
- 1.2 Peningkatan rasa aman, stabilitas keamanan untuk menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan;
- 1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
- 1.4 Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang harmonis agar tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai dengan optimal.

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai seluruhnya 30 Orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Strata 2 : 5 Orang.
 - b. Strata 1 / D4 : 12 Orang
 - c. Diploma : 3 Orang

d. SMA	:	10 Orang
e. SMP	:	- Orang
<hr/>		
Jumlah	:	30 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

a. Golongan IV	:	7 Orang
b. Golongan III	:	13 Orang
c. Golongan II	:	8 Orang
d. Golongan I	:	- Orang
e. PPPK Kelas V	:	1 Orang
f. Honorer / Non PNS	:	1 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	30 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural.

a. Eselon II	:	1 Orang
b. Eselon III	:	4 Orang
c. Eselon IV	:	7 Orang
d. Staf	:	18 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	30 Orang

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional	:	9 Orang
<hr/>		
Jumlah	:	9 Orang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

1. VISI

Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah dokumen jangka menengah Kabupaten Ponorogo yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Namun, Dalam kurun waktu 2025 terjadi transisi antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis yang disusun berisi tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Mewujudkan Ponorogo HEBAT"

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia didasarkan pada keselarasan hierarkis antara visi nasional, visi provinsi, dan visi kabupaten / kota. Visi Nasional "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**" menjadi payung besar yang memayungi seluruh kebijakan daerah, termasuk Visi Provinsi Jawa

Timur "**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan Menuju Indonesia emas 2045**" dan Visi Kabupaten Ponorogo "**Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)**". Ketiganya saling terkait dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan yang holistik, integratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Visi Provinsi Jatim menjadi "jembatan" antara target Nasional dan Kabupaten Ponorogo.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 maka dirumuskan 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Pelindungan Sosial;
2. Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD, dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi;
4. Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi.

2. TUJUAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi 3 "Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi".

Dari misi dalam RPJMD diatas maka dapat dituangkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

**“Terciptanya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib,
aman dan harmonis”**

3. SASARAN

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan Indikator kinerja mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, yaitu:

**Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		KETERANGAN
		TARGET	CAPAIAN	
RPJMD Tahun 2021-2026				
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	Jumlah Kriminalitas	250	270	
	Persentase konflik sosial yang dapat diredam	100%	100%	
RPJMD Tahun 2025-2029				
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1.	Angka Kriminalitas	25,57	27,62	Data yang disampaikan belum merupakan nilai pasti karena data jumlah penduduk tahun 2025 belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tanggal 5 Februari 2026. Oleh karena itu, penghitungan saat ini masih menggunakan data jumlah penduduk tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		KETERANGAN
		TARGET	CAPAIAN	
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	-	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,49	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2025 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD, Renstra serta Renja baru.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.2
Reviu Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RPJMD Tahun 2021-2026			
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	250 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %
RPJMD Tahun 2025-2029			
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92
		Angka Kriminalitas	26,08
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 merupakan jembatan untuk mewujudkan target kinerja yang telah dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya. Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut meliputi capaian kinerja dan anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai berhasil atau tidaknya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Capaian Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal. Skala Ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1
Pencapaian Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
RPJMD Tahun 2021-2026				
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	250 Kasus	270 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %	100%
RPJMD Tahun 2025-2029				
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	76,49
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	
Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
RPJMD Tahun 2021-2026				
				capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026
		Angka Kriminalitas	26,08	27,62
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	Belum keluar nilai SAKIP 2025

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1. Capaian Sasaran : Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat diukur dengan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
RPJMD Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	250 Kasus	270 Kasus	92%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %	100%	100%
RPJMD Tahun 2025-2029					
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	76,49	100,03%
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
RPJMD Tahun 2021-2026					
				periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026	
		Angka Kriminalitas	26,08	27,62	94,09%
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	Belum keluar nilai SAKIP 2025	-

Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, kami menyampaikan kedua capaian sebelum atau sesudah adanya perubahan RPJMD. Indikator pada RPJMD 2021-2026 adalah jumlah kriminalitas dengan capaian kinerja 92% masuk kategori **Berhasil**. Indikator kedua adalah prosentase potensi konflik yang dapat diredam dengan capaian kinerja 100% masuk kategori **Berhasil**.

Sedangkan capaian indikator RPJMD 2025-2029 yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)(IKUB) memperoleh capaian 100,03% masuk kategori **Sangat Berhasil**. Indikator kedua yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada indikator ini sampai waktu penyusunan Laporan Kinerja ini belum bisa menghitung capaiannya karena pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di

tahun 2026. Capaian kinerja indikator ketiga yaitu Angka Kriminalitas dengan capaian kinerja 94,09% masuk kategori **Berhasil**. Indikator terakhir yaitu Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah juga belum bisa dihitung karena nilai SAKIP tahun 2025 belum rilis.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
RPJMD Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	250 Kasus	211 Kasus	270 Kasus
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %	100%	100%
RPJMD Tahun 2025-2029					
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	-	76,49
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	-	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
RPJMD Tahun 2021-2026					
					tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026
		Angka Kriminalitas	26,08	-	27,62
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	-	Belum keluar nilai SAKIP 2025

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode
RENSTRA 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
RENSTRA Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	245 Kasus	270 Kasus	89,8%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %	100%	100%
RENSTRA Tahun 2025-2029					
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,50	76,49	98,7%
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	85,32	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
RENSTRA Tahun 2021-2026					
				berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026	
		Angka Kriminalitas	23,52	27,62	82,57%
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80	Belum keluar nilai SAKIP 2025	-

Berdasarkan indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026)
Sasaran 1: Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Tahun 2025 target realisasi jumlah kriminalitas yang telah ditargetkan terjadi 250 kasus, berdasarkan data dari POLRES Ponorogo terealisasi 270 kasus. Persentase capaiannya yaitu 92%, sedangkan untuk target prosentase potensi konflik yang dapat diredam ditargetkan 100%. Pada tahun 2025 persentase capaiannya 100%.

Berdasarkan indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021-2026)

Sasaran 1: Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat

Tahun 2025 target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah 77,50. Capaian atas target tersebut adalah 76,49. Sehingga persentase capaiannya 98,7%.

Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 adalah 85,32. Capaian atas target tersebut belum bisa dihitung karena pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026.

Target selanjutnya yaitu Angka Kriminalitas dengan target 23,52. Capaian target tersebut adalah 27,62. Sehingga persentase capaian atas target tersebut sebesar 82,57%.

Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Tahun 2025 untuk mewujudkan sasaran 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki target Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 79,41. Capaian target tersebut belum dapat dihitung karena Nilai SAKIP tahun 2025 belum rilis.

Kondisi pencapaian semua target tersebut di peroleh dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam rangka untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif yaitu dengan adanya sosialisasi, pembinaan, pemantauan terhadap masyarakat maupun situasi wilayah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Efektif dan tidaknya fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- b. Komitmen para tokoh agama dalam memfasilitasi umat agar selalu toleransi antar umat beragama.
- c. Ketersediaan data yang memadai, akurat, dan tepat waktu merupakan prasyarat utama dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Setiap

indikator IDI membutuhkan data pendukung yang bersumber dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ketidaklengkapan data, keterlambatan penyampaian, maupun kualitas data yang rendah dapat menghambat proses penilaian dan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian IDI.

- d. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, metodologi, dan indikator pengukuran IDI menjadi faktor penting lainnya. Kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah daerah, lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap indikator, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek-aspek demokrasi yang diukur.
- e. Pencapaian indikator kinerja angka kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun menghambat. Dari sisi internal, keberhasilan pencapaian IK sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana prasarana keamanan yang memadai, serta koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum. Penerapan teknologi pengawasan modern seperti CCTV dan sistem informasi kriminal yang terintegrasi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka kriminalitas.
- f. Faktor eksternal yang mendukung tercapainya IK meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, kondisi ekonomi yang stabil, tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat yang meningkat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang pro-keamanan. Penerangan jalan yang baik dan lingkungan sosial yang kondusif turut menciptakan rasa aman di masyarakat. Sebaliknya, hambatan pencapaian IK dapat bersumber dari keterbatasan jumlah personel dan anggaran operasional, minimnya pelatihan SDM aparat, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Dari sisi eksternal, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, urbanisasi yang tidak terkendali, penyalahgunaan narkoba, serta lemahnya kontrol sosial masyarakat menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan angka kriminalitas dan menghambat pencapaian target IK yang telah ditetapkan.

Permasalahan :

Permasalahan sosial, keagamaan dan etnis serta suku masih tetap menjadi perhatian yang serius mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat seperti :

- Masih terjadinya perbedaan persepsi tokoh agama terhadap aliran kepercayaan;
- Kurangnya rasa toleransi dalam bentuk aksi seperti sebagai bakti sosial Bersama antar umat beragama dan aksi sosial lainnya;
- Sampai saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masih ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat pemerintah pusat dan gubernur, dan belum menjadi kewajiban kinerja bagi Bupati/Walikota. Kondisi tersebut berdampak pada belum tersusunnya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait pengukuran dan pemantauan IDI di tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan juknis mengakibatkan belum adanya standar yang seragam dalam pengumpulan data, pemenuhan indikator, serta pelaporan capaian demokrasi di daerah. Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan dalam memahami peran dan kontribusi yang dapat dilakukan secara sistematis terhadap peningkatan IDI;
- Konflik yang di sebabkan adanya pergesekan antar perguruan Pencak Silat yang ada di Kabupaten Ponorogo;
- Konflik sosial ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi.

Rencana Tindak Lanjut :

Dari permasalahan diatas maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu:

- Mengintensifikasikan dialog konstruktif didalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM);
- Terus mendukung baik FKUB, Forum Komunikasi Aliran Kepercayaan, Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) untuk mengejawantahkan toleransi dalam kegiatan nyata;
- Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota,

maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota, maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta pengalaman penelitian yang relevan dengan pengukuran indikator demokrasi. Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah daerah dapat memperoleh pendampingan dalam memahami konsep, dimensi, dan indikator IDI secara lebih komprehensif, meskipun belum terdapat juknis resmi dari pemerintah pusat untuk tingkat kabupaten/kota. Asistensi yang diberikan oleh akademisi dapat mencakup penyusunan kerangka pengukuran internal, pemetaan indikator IDI yang relevan dengan kewenangan kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat melakukan pengukuran dan evaluasi kondisi demokrasi secara terarah sebagai bahan perbaikan kebijakan, tanpa harus menunggu kebijakan formal dari pusat;

- Menjaga agar tidak terjadi gesekan antar perguruan Silat dan Beladiri melalui Pembinaan pengurus maupun anggota forum komunikasi pencak silat dan beladiri (FKPSB) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
- Meningkatkan peran sinergitas Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi timbulnya konflik. Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);

RENCANA AKSI TAHUN 2025:

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.252.706.000,00
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp163.950.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp358.040.300,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp13.500.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp42.711.154,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp119.570.446,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp1.232.526.700,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Rp1.790.774.400,00

No	Program	Kegiatan	Anggaran
		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp303.730.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp128.973.300,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp2.975.200.000,00
	TOTAL		Rp10.381.682.300,00

B. REALISASI ANGGARAN.

Perincian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	10.313.182.300	10.182.830.172	98,73
	- Belanja Pegawai	3.169.094.000	2.977.870.708	96,88
	- Belanja Barang dan Jasa	3.534.624.300	3.503.203.584	99,11
	- Belanja Hibah	3.609.464.000	3.609.323.360	99,99
2.	Belanja Modal	68.500.000	67.299.300	98,24
	- Belanja modal peralatan dan mesin	68.500.000	67.299.300	98,24
	Jumlah	10.381.682.300	10.250.129.472	98,73

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp10.381.682.300,00 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp10.313.182.300,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp68.500.000,00

Dapat direalisasikan sebesar Rp10.250.129.472,00 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp10.182.830.172,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp67.299.300,00

Terdapat sisa anggaran Rp131.552.828,00. Alokasi anggaran per sasaran indikator kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
RPJMD Tahun 2021-2026				
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	10.250.129.472,00	98,73%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.		
RPJMD Tahun 2025-2029				
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	10.250.129.472,00	98,73%
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Angka Kriminalitas Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		

Besaran anggaran belanja operasi program strategis adalah sebesar Rp10.381.682.300,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp10.250.129.472,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 98,73%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja operasi adalah sejumlah Rp10.182.830.172,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 98,73%.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
RPJMD Tahun 2021-2026								
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	250 Kasus	270 Kasus	92%	10.381.682.300,00	10.250.129.472,00	98,73%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100 %	100%	100%			
RPJMD Tahun 2025-2029								
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	76,49	100,03%	10.381.682.300,00	10.250.129.472,00	98,73%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
RPJMD Tahun 2021-2026								
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang	-			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
RPJMD Tahun 2021-2026								
				capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026				
		Angka Kriminalitas	26,08	27,62	94,09%			
		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	Belum keluar nilai SAKIP 2025	-			

Dari tabel 3.5 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
RPJMD Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.	Jumlah kriminalitas	92%	98,73%	97,2%
		Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.	100%		
RPJMD Tahun 2025-2029					
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100,03%	98,73%	98,3%
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-		
		Angka Kriminalitas	94,09%		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
RPJMD Tahun 2021-2026					
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-		

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi antara RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana;
2. Analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-

2026, 1 (satu) indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator lainnya sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

- a) Indikator jumlah kriminalitas terealisasi sebesar 92%
- b) Indikator prosentase potensi konflik yang dapat diredam mencapai 100%.

3. Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, 1 (satu) indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan, 1 (satu) indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan 2 (dua) indikator belum bisa dihitung capaiannya, yaitu:

- a) Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan capaian 100,03%
- b) Indikator Angka Kriminalitas dengan capaian 94,09%.
- c) Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) belum bisa menghitung capaiannya karena pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026.
- d) Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah belum bisa dihitung capaiannya karena Nilai SAKIP tahun 2025 belum rilis.

B. SARAN

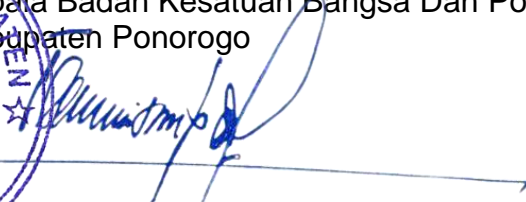
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam deteksi dini terjadinya konflik sosial;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan berpolitik;

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yang ada dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.



Ponorogo, 31 Desember 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 196805121990092002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025

INSTANSI	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
VISI	: Mewujudkan Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan ber-Taqwa
MISI	: Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
TUJUAN	: Menjaga Kelestarian Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan
TUGAS	: Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yang Diberikan Kepada Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;4. Pelaksanaan Administrasi Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya rasa aman dan tentram di masyarakat	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$\frac{\text{Nilai Aspek Toleransi} + \text{Nilai Aspek Kesetaraan} + \text{Nilai Aspek Kerjasama}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan setiap Aspek})}$	Survei Masyarakat	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
	2.	Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Kriminalitas dalam satu tahun} \times 100.000}{\text{Jumlah penduduk}}$	Kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	3.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	$(\text{Nilai penimbang aspek kebebasan} \times \text{nilai aspek kebebasan}) + (\text{Nilai penimbang aspek kesetaraan} \times \text{nilai aspek kesetaraan}) + (\text{Nilai penimbang aspek kapasitas lembaga demokrasi} \times \text{nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi})$	Media Massa, Dokumen dan FGD	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan


 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Ponorogo

 Dra. Besse Tenrisampéang, M.Si.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 196805121990092002

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025 – 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,52	76,70	77	77,20	77,50	
		Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	85	85,08	85,16	85,24	85,32	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Angka Kriminalitas	26,08	25,56	25,05	24,54	24,03	23,52	
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	79,50	79,70	79,80	79,90	80	

INDIKATOR KINERJA DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1.	Angka Kriminalitas	Angka	26,08	25,56	25,05	24,54	24,03	23,52	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	84,92	85	85,08	85,16	85,24	85,32	
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,47	76,52	76,70	77	77,20	77,50	



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6 Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur 63413
Telepon (0352) 483 852, Faksimile (0352) 483 852,
Laman [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Pos-el bakesbangpolponorogo@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lisdyarita, S.H

Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lisdyarita

Ponorogo, 17 November 2025

Pihak Pertama,

Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196805121990092002

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92
		Angka Kriminalitas	26,08
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp3.950.477.900,00	PAPBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp1.232.526.700,00	PAPBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp1.790.774.400,00	PAPBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp303.730.000,00	PAPBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp128.973.300,00	PAPBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp2.975.200.000,00	PAPBD
Jumlah		Rp10.381.682.300,00	

Pihak Kedua,


Lisdyarita

Ponorogo, 17 November 2025

Pihak Pertama,


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196805121990092002

**PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

NO	Tujuan	Sasaran	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2025					SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				TARGET	CAPAIAN					
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
RPJMD Tahun 2021-2026										
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
	Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Jumlah Kriminalitas	250	-	-	-	270	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	
	Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Persentase konflik sosial yang dapat diredam	100%	-	-	-	100%	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	
RPJMD Tahun 2025-2029										
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Angka Kriminalitas	25,57	-	-	-	27,62	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	Data yang disampaikan belum merupakan nilai pasti karena data jumlah penduduk tahun 2025 belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan

NO	Tujuan	Sasaran	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2025					SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				TARGET	CAPAIAN					
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
										Pencatatan Sipil hingga tanggal 5 Februari 2026. Oleh karena itu, penghitungan saat ini masih menggunakan data jumlah penduduk tahun 2024
2.	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	-	-	-	-	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	Pada dasarnya, penghitungan capaian tahun 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan data capaian tahun 2025 yang berakhir per 31 Desember 2025 baru tersedia untuk dihitung pada tahun berikutnya. Mengingat IDI menggunakan data sekunder yang capaiannya mencakup periode hingga 31 Desember 2025, maka perkiraan hasil akhir tahun baru dapat diperoleh di tahun 2026
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
1.	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan	Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	-	-	-	76,49	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	

NO	Tujuan	Sasaran	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2025					SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				TARGET	CAPAIAN					
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
	harmonis									
	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	-	-	-	79,41	Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	Penghitungan Nilai SAKIP ini belum bisa dilakukan karena Nilai SAKIP belum rilis

Ponorogo, 31 Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo



[Handwritten Signature]
Dra. Besse Tenri Sampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002